

## Dinamika Etika Komunikasi Guru dan Siswa di Media Sosial

(Studi Pustaka Teori Manajemen Privasi Komunikasi)

Muhammad Nurafni Junianto<sup>1</sup>, Diah Maharani<sup>2</sup>, Muhammad Jembar Risky<sup>3</sup>,  
Muhlisin<sup>4</sup>, Abul Mafaakhir<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [muhammad.nurafni.junianto@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:muhammad.nurafni.junianto@mhs.uingusdur.ac.id),

[diah.maharani@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:diah.maharani@mhs.uingusdur.ac.id), [muhammad.jembar.risky@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:muhammad.jembar.risky@mhs.uingusdur.ac.id),

[muhlisin@uingusdur.ac.id](mailto:muhlisin@uingusdur.ac.id), [abul.mafaakhir@uingusdur.ac.id](mailto:abul.mafaakhir@uingusdur.ac.id)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 11 Mei 2026

### ABSTRACT

The rise of social media has transformed communication patterns between teachers and students, while also raising ethical challenges regarding the boundaries of privacy and professionalism. This study aims to analyze the ethical dynamics of teacher-student communication on social media through the lens of Communication Privacy Management (CPM) Theory. This study employs a qualitative approach using descriptive methods, involving a literature review and content analysis of relevant literature. The results indicate that interactions in digital spaces tend to blur the boundaries between the personal and professional spheres, thereby triggering privacy conflicts when rules are not mutually understood. Teachers and students act as co-owners of information, necessitating clear coordination of privacy boundaries. Ethical issues such as oversharing, privacy violations, and cyberbullying emerge as primary challenges. Additionally, differences in digital literacy and generational gaps further widen communication divides. The implementation of appropriate privacy management strategies, such as setting boundaries and managing information responsibly, is key to maintaining professionalism and trust. This study underscores the importance of strengthening digital communication ethics to support safe and constructive educational interactions.

**Keywords:** Communication Ethics, Social Media, Privacy Management, Teacher-Student Interaction

### ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi antara guru dan siswa, sekaligus memunculkan tantangan etika terkait batasan privasi dan profesionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika etika komunikasi guru dan siswa di media sosial melalui perspektif Teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui studi pustaka dan analisis isi terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi di ruang digital cenderung mengaburkan batas antara ranah pribadi dan profesional, sehingga memicu turbulensi privasi ketika aturan tidak dipahami secara bersama. Guru dan siswa berperan sebagai pemilik bersama informasi, sehingga diperlukan koordinasi batas privasi yang jelas. Permasalahan etika seperti oversharing, pelanggaran privasi, dan cyberbullying menjadi tantangan utama. Selain itu, perbedaan literasi digital dan generasi turut memperlebar kesenjangan komunikasi. Penerapan strategi manajemen privasi yang tepat, seperti penetapan batas dan pengelolaan informasi secara bertanggung jawab, menjadi

---

*kunci menjaga profesionalitas dan kepercayaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika komunikasi digital dalam mendukung interaksi pendidikan yang aman dan konstruktif.*

**Kata Kunci:** *Etika Komunikasi, Media Sosial, Manajemen Privasi, Interaksi Guru-Siswa.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mentransformasi pola interaksi di lingkungan pendidikan, di mana platform digital kini menjadi ruang ketiga bagi komunikasi antara guru dan siswa yang melampaui batas ruang kelas tradisional. Fenomena ini menciptakan keterbukaan informasi yang masif, namun di sisi lain memicu ambiguitas etika terkait batasan ranah privat dan profesional. Dalam mengelola batasan tersebut, individu cenderung membangun sistem aturan untuk menentukan siapa yang boleh mengakses informasi mereka. Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam Manajemen Privasi Komunikasi yang menyatakan bahwa manusia selalu menegosiasikan keseimbangan antara pengungkapan (*disclosure*) dan perlindungan informasi pribadi guna menjaga privasi mereka (Petronio, 2015).

Dinamika komunikasi ini sering kali menimbulkan tantangan baru, terutama ketika aturan privasi antara guru dan siswa tidak selaras, yang dapat berujung pada turbulensi hubungan di media sosial. Manajemen privasi Komunikasi menjadi sangat krusial agar interaksi digital tetap berada dalam koridor etika kependidikan tanpa melanggar hak privasi masing-masing pihak. Penggunaan media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran menuntut pemahaman mendalam mengenai etika komunikasi, mengingat setiap pesan atau konten yang dibagikan memiliki implikasi terhadap citra profesional guru maupun perkembangan karakter siswa. Penerapan strategi manajemen privasi yang tepat menjadi kunci dalam meminimalisir konflik dan menjaga keharmonisan interaksi edukatif di ruang siber (Petronio & Hernandez, 2019).

Pergeseran paradigma komunikasi pendidikan dari interaksi tatap muka ke ruang digital telah menciptakan batasan yang semakin cair antara lingkungan akademik dan personal. Media sosial, yang awalnya dirancang untuk interaksi sosial informal, kini diadopsi menjadi sarana instruksional yang memungkinkan komunikasi guru dan siswa berlangsung tanpa hambatan waktu dan geografis. Namun, perubahan ini menuntut adanya redefinisi etika komunikasi, karena interaksi di ruang digital sering kali mengurangi formalitas yang biasanya terjaga di dalam kelas fisik. Fenomena ini mengharuskan kedua belah pihak untuk lebih bijak dalam mengelola pesan agar pesan-pesan instruksional tidak tercampur aduk dengan ekspresi pribadi yang dapat memicu kesalahpahaman profesional (Salsabilaa, 2025).

Dalam perspektif Manajemen Privasi Komunikasi, transisi ke ruang digital memaksa guru dan siswa untuk melakukan negosiasi ulang mengenai aturan privasi mereka. Ketika guru dan siswa terhubung di media sosial, terjadi pembentukan "batas kolektif" di mana informasi pribadi menjadi milik bersama dalam jaringan tersebut. Tanpa adanya kesepakatan etika yang jelas, pengungkapan informasi di ruang digital dapat menyebabkan turbulensi privasi yang mengancam kredibilitas guru maupun kenyamanan siswa. Pemahaman mengenai etika

---

komunikasi digital menjadi fundamental untuk memastikan bahwa perubahan pola interaksi ini tetap mendukung tujuan pedagogis tanpa mengorbankan privasi individu masing-masing pihak (Alfiarni, 2022).

Integrasi media sosial dalam hubungan edukatif membawa konsekuensi logis berupa munculnya berbagai permasalahan etika, terutama terkait kaburnya batasan profesionalitas (*professional boundaries*). Penggunaan platform digital sering kali memicu penggunaan bahasa yang kurang formal dan tidak sesuai dengan norma kesantunan akademik, yang mana siswa cenderung menyamakan gaya berkomunikasi kepada guru dengan gaya berkomunikasi kepada rekan sebaya. Selain itu, aksesibilitas yang tinggi di media sosial memungkinkan guru dan siswa untuk saling melihat kehidupan pribadi satu sama lain, yang jika tidak dikelola dengan aturan privasi yang ketat, dapat merusak otoritas guru dan menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi siswa dalam proses belajar-mengajar (Manik, 2025).

Integrasi media sosial dalam hubungan edukatif membawa konsekuensi logis berupa munculnya berbagai permasalahan etika, terutama terkait kaburnya batasan profesionalitas (*professional boundaries*). Penggunaan platform digital sering kali memicu penggunaan bahasa yang kurang formal dan tidak sesuai dengan norma kesantunan akademik, yang mana siswa cenderung menyamakan gaya berkomunikasi kepada guru dengan gaya berkomunikasi kepada rekan sebaya. Selain itu, aksesibilitas yang tinggi di media sosial memungkinkan guru dan siswa untuk saling melihat kehidupan pribadi satu sama lain, yang jika tidak dikelola dengan aturan privasi yang ketat, dapat merusak otoritas guru dan menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi siswa dalam proses belajar-mengajar (Manik, 2025).

Dalam tinjauan Teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM), permasalahan etika ini sering kali berakar pada adanya turbulensi privasi, yaitu kondisi di mana aturan ekspektasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan dan dilanggar oleh salah satu pihak. Ketidakjelasan mengenai ruang publik dan ruang privat di media sosial membuat informasi sensitif rentan tersebar tanpa kendali, sehingga menimbulkan risiko terhadap reputasi profesional pendidik. Penting bagi institusi pendidikan untuk merumuskan pedoman etika komunikasi digital yang jelas guna mengatur manajemen privasi dan standar bahasa, agar interaksi di ruang siber tetap menjaga marwah pendidikan dan melindungi hak privasi individu (Amelia dkk, 2025).

Pengelolaan privasi dalam komunikasi digital antara guru dan siswa menjadi aspek krusial karena adanya tegangan antara keinginan untuk terbuka demi kedekatan instruksional dan kebutuhan untuk melindungi ruang personal. Berdasarkan teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM), individu menganggap informasi pribadi sebagai milik yang harus dikendalikan melalui pembangunan batas-batas privasi. Dalam konteks pendidikan di media sosial, guru dan siswa berperan sebagai "pemilik bersama" (*co-owners*) atas informasi yang dibagikan dalam interaksi tersebut. Tanpa adanya regulasi mandiri yang kuat, batas-batas ini dapat ditembus, sehingga pengelolaan privasi yang sadar diperlukan untuk menjaga

---

wibawa profesional pendidik serta kenyamanan siswa dalam berinteraksi (Sabarin, & Djunaidi, 2018).

Implementasi aturan privasi yang jelas berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk mencegah terjadinya turbulensi komunikasi, yaitu konflik yang muncul ketika ekspektasi privasi dilanggar. Pentingnya pengelolaan ini terletak pada kemampuan individu untuk menegosiasikan "aturan akses" dan "aturan perlindungan" guna menentukan informasi apa saja yang layak dikonsumsi publik sekolah. Dengan menerapkan strategi manajemen privasi yang tepat, guru dapat memisahkan identitas pribadi dengan identitas profesionalnya di ruang digital, sementara siswa belajar mengenai etika pengungkapan diri yang bertanggung jawab. Teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM) memberikan kerangka kerja yang aplikatif bagi praktisi pendidikan untuk meminimalisir risiko sosial di media sosial sekaligus mengoptimalkan potensi komunikasi digital yang harmonis (Petronio, 2015).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membedah secara mendalam bagaimana guru dan siswa menegosiasikan batasan-batasan privasi mereka saat berinteraksi di platform media sosial. Dengan menggunakan perspektif teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM), penelitian ini berupaya mengungkap mekanisme pembentukan aturan privasi yang digunakan oleh guru dan siswa untuk melindungi informasi pribadi mereka sekaligus tetap menjaga konektivitas edukatif. Memahami dinamika ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana "batas-batas kolektif" dibentuk secara sengaja atau tidak sengaja, serta bagaimana transparansi informasi di ruang digital mempengaruhi persepsi etika di antara guru dan siswa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena manajemen privasi komunikasi antara guru dan siswa di media sosial. Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam dan mendeskripsikan bagaimana individu menegosiasikan aturan privasi, membangun batas kolektif, serta menghadapi turbulensi komunikasi dalam interaksi digital (Sugiyono, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumen dan literatur (*library research*) untuk mengonstruksi fenomena berdasarkan teori Manajemen Privasi Komunikasi dari Sandra Petronio.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi konsep, interpretasi makna, serta penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM) digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana individu mengelola batasan privasi dalam komunikasi, termasuk dalam interaksi digital antara guru dan siswa. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki kontrol terhadap informasi pribadinya dan menetapkan batasan tertentu dalam proses komunikasi (Petronio & Child, 2020).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Etika Komunikasi di Media Sosial*

Secara substansial, etika merupakan disiplin ilmu yang memuat prinsip-prinsip moral mengenai standar kebaikan serta hak-hak individu dalam kehidupan sosial. Sebagai pedoman perilaku, etika berfungsi mengarahkan manusia menuju karakter ideal melalui pemahaman mendalam terhadap kewajiban-kewajibannya. Penilaian terhadap tindakan manusia, baik secara moral maupun hukum, berakar pada kaidah etika yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman seseorang terhadap aspek religi, moralitas, dan kesusilaan. Dengan demikian, kualitas perilaku seseorang berbanding lurus dengan kedalaman pemahamannya terhadap nilai-nilai tersebut (Cangara, 2023).

Lasswel dalam Onong Uchjana Effendy (2011) mengatakan komunikasi adalah proses pencapaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dan pada hakikatnya proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan sekunder. Secara integratif, komunikasi dapat disimpulkan sebagai proses transmisi informasi, baik secara langsung maupun termediasi, untuk mencapai tujuan kolektif. Urgensi etika dalam proses ini adalah untuk memastikan interaksi berlangsung harmonis tanpa mencederai perasaan pihak lain, mengingat etika berfungsi sebagai filter untuk membedakan tindakan yang pantas, berguna, dan benar (Priyono, 2022).

Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli mempunyai definisi yang berbeda seperti di bawah ini:

- a. **Menurut Carl I. Hovland**, mendefinisikan *Communication is the process of modifying the behavior of individuals* (proses mengubah perilaku orang lain).
- b. **Menurut Lasswell**, komunikasi adalah proses pencapaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
- c. **Menurut Murphy**, mendefinisikan *Communication is the whole process used to reaching other minds*. Komunikasi adalah proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran yang dimaksudkan orang lain.

Merujuk pada para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pihak komunikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu, hakikat etika dan komunikasi dapat disimpulkan adanya komunikator dan komunikan, tujuan komunikasi, siapa sasaran komunikasi, dan bagaimana teknik komunikasi yang digunakan agar terjalin komunikasi yang baik.

Teknologi komunikasi digital, yang berbasis pada sistem bilangan biner dan sinyal elektrik komputer, telah mengubah lanskap interaksi masyarakat Indonesia secara masif. Dengan jumlah pengguna telepon seluler yang mencapai 175 juta jiwa, etika komunikasi digital menjadi fundamental sebagai kompas moral dalam ruang siber. Etika ini bukan sekadar batasan normatif, melainkan panduan perilaku bertanggung jawab demi menjaga kualitas diskursus publik yang inklusif dan terpercaya (Priyono, 2022). Etika komunikasi digital merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengarahkan cara individu, organisasi, dan komunitas berinteraksi serta menyampaikan informasi dalam ruang digital.

Etika dalam komunikasi digital juga berperan penting dalam membangun kepercayaan. Etika komunikasi digital bukanlah kumpulan larangan, melainkan panduan untuk berperilaku bijak, bertanggung jawab, dan manusiawi dalam ruang digital. Ia menjadi fondasi penting dalam membangun komunikasi yang sehat, menghormati hak-hak semua pihak, dan menjaga kualitas percakapan publik agar tetap bermakna dan inklusif di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang (Don & Armawan, 2025).

Dalam dinamika sosial, komunikasi merupakan instrumen primer untuk membangun relasi dan menyelesaikan konflik. Namun, minimnya internalisasi etika berisiko memicu disonansi sosial dan keretakan hubungan. Terdapat empat pilar utama yang mendasari etika komunikasi (Azzahra dkk, 2025). Kesopanan yaitu menjaga norma sosial dan budaya. Tanggung jawab mengingatkan bahwa setiap pesan memiliki konsekuensi. Empati membantu kita memahami lawan bicara, sementara keadilan memastikan setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam berkomunikasi. Etika komunikasi tidak hanya berlaku dalam konteks formal, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip etika komunikasi diantaranya:

**a. Kesopanan**

Rasa hormat dan sopan santun merupakan bagian penting dari nilai-nilai etika yang berkaitan dengan cara seseorang memperlakukan orang lain dengan baik, menghargai perbedaan, dan menjaga adab dalam berkomunikasi. Nilai ini mencakup kemampuan menggunakan kata-kata yang baik, berbicara dengan nada yang tepat, serta bersikap menghargai orang lain baik kepada guru, teman sebaya, maupun orang dewasa lainnya (Sari, 2026).

**b. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam komunikasi adalah prinsip etika yang mengharuskan individu atau organisasi untuk menyadari dan mempertimbangkan konsekuensi dari pesan yang mereka sampaikan (Widayanthi & Wulandari, 2025). Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas tertentu, tetapi juga mencakup kesadaran diri, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Penanaman nilai tanggung jawab perlu dilakukan melalui komunikasi yang bersifat edukatif, menyenangkan, dan penuh keteladanan.

**c. Kejujuran**

Kejujuran adalah pilar utama dalam setiap bentuk komunikasi. Kejujuran adalah prinsip dasar dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua bentuk komunikasi, Komunikasi yang jujur bukan hanya penting untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi penerus mendapatkan bimbingan yang benar dan adil (Jaya, 2024).

**d. Empati**

Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami serta ikut merasakan kondisi yang dialami orang lain, dan menunjukkan perhatian terhadap perasaan tersebut. Empati menjadi nilai etika yang sangat penting untuk mulai ditanamkan karena berperan dalam membentuk karakter sosial

yang peduli, bertoleransi, dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain.

Perubahan paradigma komunikasi dari ranah analog ke digital telah mengubah secara mendasar cara berinteraksi, membentuk identitas, dan membangun relasi sosial. Media digital tidak hanya menjadi alat penyampaian pesan, tetapi juga ruang sosial yang kompleks, tempat nilai, norma, dan konflik diaktualisasikan secara virtual. Kemajuan teknologi telah membuka banyak peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga etika komunikasi (Margaretta, 2025). Adapun tantangan komunikasi di media sosial diantaranya:

**a. *Over Sharing***

Media sosial memberikan fasilitas bagi warganet untuk bertukar informasi, dengan cara mengunggah foto, video, dan kegiatan sehari-harinya. Aktivitas berbagi informasi pribadi yang terlalu sering disebut oversharing. Oversharing secara psikologis merupakan suatu kebutuhan manusia untuk diperhatikan dan mendapat dukungan sosial. Namun secara tidak langsung, aktivitas tersebut justru lebih banyak membahayakan pengunggahnya, di mana ancaman-ancaman cyberbullying, intimidasi, bahkan kejahatan yang dilakukan secara langsung seperti perampokan, dan pemerkosaan akan lebih mudah terjadi akibat postingan-postingan pribadi di media sosial (Bunga dkk, 2022).

**b. *CyberBullying***

Perundungan di dunia maya mencakup spektrum luas, mulai dari komentar ofensif hingga penyebaran fitnah dan ancaman melalui media digital. Karena meninggalkan jejak digital yang permanen, mitigasi terhadap fenomena ini memerlukan pembatasan interaksi yang sehat serta selektivitas dalam berkomunikasi dengan individu yang tidak dikenal. (Putra dkk, 2023).

**c. *Pelanggaran Privasi***

Privasi merupakan hak asasi yang fundamental dalam komunikasi digital. Di tengah kemudahan pengumpulan data untuk personalisasi konten, pengguna memiliki hak mutlak untuk mengetahui pengelolaan informasi pribadi mereka. Distribusi data tanpa izin merupakan pelanggaran moral sekaligus regulasi, sehingga penghormatan terhadap privasi menjadi syarat mutlak bagi ekosistem digital yang sehat. (Don & Armawan, 2025). Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin eksplisit dari pemiliknya adalah bentuk pelanggaran privasi. Menghormati privasi tidak hanya soal kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan saling percaya (Solove & Schwartz, 2020).

### ***Komunikasi Guru dan Siswa di Era Digital***

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dalam dunia pendidikan secara signifikan. Jika sebelumnya interaksi guru dan siswa berlangsung secara tatap muka dan formal di ruang kelas, kini komunikasi meluas ke berbagai platform digital seperti WhatsApp, Instagram, hingga Learning

---

Management System (LMS). Perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan dalam menjaga etika dan profesionalitas.

Media sosial menjadi salah satu ruang baru dalam komunikasi pendidikan. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi di kelas, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat diakses melalui platform digital. Komunikasi ini cenderung lebih fleksibel, cepat, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Namun demikian, pola komunikasi di media sosial seringkali bersifat semi-formal bahkan informal. Hal ini berpotensi mengaburkan batas antara hubungan profesional dan personal. Menurut Neil Selwyn, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga membentuk ulang relasi sosial antara guru dan siswa, termasuk cara mereka berkomunikasi (Selwyn, 2016).

Selain itu, pola komunikasi di media sosial juga cenderung bersifat instan dan responsif. Siswa mengharapkan balasan cepat dari guru, sebagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya di platform digital. Hal ini menuntut guru untuk menyesuaikan ritme komunikasi tanpa kehilangan kontrol profesionalitasnya. Dalam perspektif Neil Selwyn, percepatan komunikasi digital seringkali menciptakan ekspektasi baru yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kerja profesional dalam pendidikan (Selwyn, 2016).

Di sisi lain, komunikasi yang terlalu cepat dan spontan berpotensi mengurangi kedalaman interaksi. Pesan yang disampaikan melalui teks singkat seringkali menimbulkan multitafsir, terutama jika tidak disertai konteks yang jelas. Hal ini berbeda dengan komunikasi tatap muka yang memungkinkan ekspresi nonverbal. Oleh karena itu, guru perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lebih jauh lagi, media sosial juga menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka, di mana interaksi tidak hanya terjadi secara privat tetapi juga publik. Diskusi di grup atau kolom komentar dapat dilihat oleh banyak pihak, sehingga guru dituntut menjaga citra profesionalnya di ruang digital. Hal ini sejalan dengan pentingnya etika digital yang ditekankan oleh UNESCO (UNESCO, 2021).

Dalam konteks digital, menjaga batas profesionalitas menjadi hal yang krusial. Guru tetap harus menjaga peran sebagai pendidik, bukan sebagai teman sebaya di media sosial. Interaksi yang terlalu santai, penggunaan bahasa yang tidak pantas, atau keterlibatan dalam urusan pribadi siswa dapat menimbulkan pelanggaran etika. Profesionalitas ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, pembatasan waktu komunikasi (tidak mengganggu di luar jam wajar), serta menghindari interaksi yang bersifat pribadi. UNESCO menekankan bahwa etika digital dalam pendidikan harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, integritas, dan perlindungan terhadap peserta didik (UNESCO, 2021).

Dalam praktiknya, batas profesionalitas seringkali diuji ketika guru dan siswa terhubung melalui akun pribadi di media sosial. Hubungan yang awalnya bersifat akademik dapat bergeser menjadi lebih personal jika tidak ada batas yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta menurunkan objektivitas guru dalam menilai siswa. Selain itu, keterbukaan informasi di media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Guru maupun siswa dapat dengan mudah mengakses kehidupan pribadi masing-masing. Jika tidak dikelola dengan baik, hal

ini dapat memengaruhi persepsi dan interaksi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk memisahkan ruang privat dan profesional secara tegas.

Dalam konteks ini, prinsip etika digital yang dikembangkan oleh UNESCO menekankan pentingnya menjaga batasan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap individu dalam ruang digital (UNESCO, 2021). Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan dalam penggunaan teknologi yang beretika. Media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Guru dapat memanfaatkan platform digital untuk berbagi materi, diskusi, hingga evaluasi pembelajaran. Selain itu, media sosial juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Menurut Henry Jenkins, budaya partisipatif di era digital memungkinkan siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pengetahuan (Jenkins dkk, 2009). Dalam konteks ini, media sosial dapat menjadi ruang kolaborasi yang mendukung pembelajaran aktif.

Namun, penggunaan media sosial tetap harus diarahkan agar tidak keluar dari tujuan pendidikan. Tanpa kontrol yang tepat, media sosial justru dapat menjadi distraksi yang mengganggu proses belajar. Pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran juga membuka peluang bagi terciptanya pembelajaran yang lebih kolaboratif. Siswa dapat berdiskusi, berbagi informasi, dan membangun pengetahuan secara bersama-sama. Hal ini mencerminkan konsep budaya partisipatif yang dikemukakan oleh Henry Jenkins, di mana individu tidak hanya menerima informasi tetapi juga aktif berkontribusi dalam proses pembelajaran (Jenkins dkk, 2009). Selain itu, media sosial memungkinkan pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Guru dapat mengaitkan materi dengan fenomena yang sedang tren di media digital, sehingga meningkatkan minat belajar. Pendekatan ini juga dapat membantu siswa memahami materi secara lebih aplikatif.

Namun demikian, penggunaan media sosial tetap memerlukan pengawasan dan perencanaan yang matang. Tanpa arahan yang jelas, siswa dapat terjebak pada konten yang tidak relevan dengan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu berperan sebagai pengarah yang memastikan bahwa media sosial digunakan secara produktif dan edukatif.

### ***Konsep Dasar Teori Manajemen Privasi Komunikasi (Sandra Petronio)***

Teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM) yang dikembangkan oleh Sandra Petronio menjelaskan bahwa individu memandang informasi pribadi sebagai milik berharga yang harus dikelola melalui sistem aturan tertentu. Dalam perspektif ini, seseorang bertindak sebagai pemilik informasi yang memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang diizinkan melintasi "batasan privasi" mereka. Ketika informasi tersebut dibagikan, status kepemilikan berubah menjadi kepemilikan bersama (*co-owners*), yang menuntut adanya koordinasi batasan agar tidak terjadi turbulensi atau konflik komunikasi akibat pelanggaran privasi (Petronio & Hernandez, 2019). Menurut Petronio, orang menciptakan batasan privasi untuk mengontrol akses terhadap informasi tersebut, di mana mereka

---

bertindak sebagai pemilik (*owners*) yang berhak menentukan siapa yang boleh menjadi pemilik bersama (*co-owners*). Proses ini melibatkan koordinasi batasan yang ketat agar tidak terjadi turbulensi atau konflik ketika informasi rahasia tersebut dibagikan kepada orang lain (Petronio & Hernandez, 2019).

Teori ini menyoroti bagaimana individu menegosiasikan batasan privasi mereka di ruang publik seperti media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi tidak hanya bergantung pada keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, gender, dan motivasi hubungan. Ketika aturan privasi yang telah disepakati dilanggar, hal tersebut dapat memicu ketegangan dalam hubungan, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai sistem aturan privasi untuk menjaga kepercayaan antar individu (Rahman & Wijaya, 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan batasan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, motivasi personal, dan konteks situasi yang dihadapi individu. Keputusan untuk mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi didasarkan pada penilaian rasio risiko dan keuntungan, di mana individu cenderung memperketat batasan jika merasa potensi kerugian lebih besar daripada manfaat dari keterbukaan tersebut. Pemahaman terhadap aturan privasi menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan interpersonal serta menghindari kesalahpahaman dalam interaksi sosial di berbagai platform media sosial (Dianiya, 2021).

Prinsip kepemilikan informasi menegaskan bahwa setiap individu merasa memiliki hak eksklusif atas data personal mereka, yang kemudian mendorong lahirnya upaya kontrol guna menjaga kerahasiaan tersebut (Petronio, 2020). Pengaturan ini dioperasikan melalui aturan privasi yang fleksibel, di mana seseorang menentukan kriteria tertentu untuk membuka atau menutup informasi berdasarkan pertimbangan budaya, motivasi personal, maupun konteks situasi (Petronio & Hernandez, 2019). Ketika informasi pribadi mulai dibagikan kepada orang lain, maka terciptalah batasan kolektif yang memerlukan koordinasi batas antarpihak yang terlibat. Proses koordinasi ini krusial untuk menyepakati siapa saja yang boleh menjadi pemilik bersama (*co-owners*) serta bagaimana informasi tersebut boleh disebarluaskan kembali. Ketidakmampuan dalam menyelaraskan aturan ini sering kali memicu turbulensi privasi, yakni situasi di mana batasan tersebut dilanggar sehingga merusak kepercayaan dalam hubungan interpersonal (Edvra dkk, 2025).

Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*) yang digagas oleh Sandra Petronio berpijak pada prinsip bahwa individu merasa memiliki informasi pribadi mereka (kepemilikan informasi) dan berusaha untuk mengaturnya melalui mekanisme kontrol. Untuk menjalankan kontrol tersebut, individu mengembangkan aturan privasi yang berfungsi sebagai panduan tentang siapa, kapan, dan informasi apa yang boleh dibagikan. Petronio menjelaskan bahwa ketika informasi pribadi berpindah dari individu ke orang lain, tercipta sebuah batasan kolektif yang memerlukan koordinasi batas. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang terlibat harus menyepakati kriteria akses agar integritas privasi tetap terjaga dan tidak memicu turbulensi hubungan (Firmansah & Ramadhan, 2024). Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*) yang digagas

---

oleh Sandra Petronio berpijak pada prinsip bahwa individu merasa memiliki informasi pribadi mereka (kepemilikan informasi) dan berusaha untuk mengaturnya melalui mekanisme kontrol. Untuk menjalankan kontrol tersebut, individu mengembangkan aturan privasi yang berfungsi sebagai panduan tentang siapa, kapan, dan informasi apa yang boleh dibagikan. Petronio menjelaskan bahwa ketika informasi pribadi berpindah dari individu ke orang lain, tercipta sebuah batasan kolektif yang memerlukan koordinasi batas. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang terlibat harus menyepakati kriteria akses agar integritas privasi tetap terjaga dan tidak memicu turbulensi hubungan (Firmansah & Ramadhan, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip ini sangat krusial dalam interaksi digital, di mana batasan informasi sering kali menjadi kabur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa koordinasi batas yang efektif antar pengguna media sosial secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran privasi dan meningkatkan kepercayaan interpersonal. Jika salah satu pihak gagal mematuhi aturan privasi yang telah disepakati, batasan tersebut akan mengalami keretakan, yang dalam Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*) disebut sebagai turbulensi. Pemahaman akan kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas informasi menjadi landasan utama dalam menjaga kerahasiaan di era keterbukaan informasi saat ini (Petronio, 2012). Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*) menjelaskan bahwa dalam ruang digital, batasan privasi menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap gangguan. Pelanggaran privasi sering kali terjadi akibat adanya ketidakselarasan antara aturan privasi pengirim dan penerima informasi, yang dalam teori Sandra Petronio disebut sebagai turbulensi batasan. Dalam konteks komunikasi digital, konsekuensi dari pelanggaran ini tidak hanya merusak kepercayaan interpersonal, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian permanen pada reputasi digital serta tekanan psikologis bagi pemilik informasi asli (Petronio & Hernandez, 2019).

Pelanggaran privasi dalam komunikasi digital sering kali terjadi akibat kegagalan dalam koordinasi batasan atau adanya perbedaan persepsi mengenai informasi yang dianggap rahasia. Dalam kerangka Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*), pelanggaran ini menciptakan turbulensi privasi, di mana aturan yang telah disepakati atau diasumsikan oleh pemilik informasi (owner) dilanggar oleh pihak lain. Konsekuensi dari fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian teknis seperti pencurian data, tetapi juga merusak tatanan hubungan interpersonal, menurunkan tingkat kepercayaan, hingga menyebabkan beban psikologis bagi korban yang informasinya tersebar tanpa izin (Kamilah & Lestari, 2020). Di ranah media sosial yang bersifat publik, konsekuensi dari pelanggaran privasi sering kali bersifat permanen karena adanya jejak digital yang sulit dihapus. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami pelanggaran privasi cenderung melakukan penarikan diri dari interaksi digital atau memperketat aturan privasi mereka secara ekstrem di masa depan. Literasi mengenai pengelolaan batasan informasi menjadi sangat krusial guna memitigasi risiko konflik dan memastikan bahwa ruang komunikasi digital tetap menjadi tempat yang aman bagi pertukaran informasi yang sehat (Dianiya, 2021).

Konsekuensi dari pelanggaran privasi di platform digital sering kali memicu konflik terbuka atau penarikan diri dari interaksi sosial secara daring. Ketika koordinasi batasan gagal dilakukan, misalnya melalui penyebaran data pribadi tanpa izin, individu cenderung melakukan renegotiasi aturan privasi yang lebih ketat atau bahkan memutuskan hubungan komunikasi. Oleh karena itu, pengelolaan kontrol informasi dalam ekosistem digital memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan transparansi antarpihak untuk meminimalkan dampak negatif dari kebocoran informasi yang bersifat privat (Suari & Sarjana, 2023).

### *Dinamika Etika Komunikasi Guru dan Siswa di Media Sosial*

Komunikasi digital tidak hanya soal kemudahan akses, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika etika yang terus berkembang. Dalam praktiknya, sering muncul berbagai persoalan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang batasan dan tanggung jawab. Di media sosial, batas antara komunikasi formal dan informal menjadi semakin tipis. Guru seringkali menggunakan gaya bahasa yang lebih santai untuk mendekati diri dengan siswa. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan kedekatan emosional, tetapi di sisi lain berisiko menurunkan wibawa dan otoritas guru. Menurut Anthony Giddens, modernitas membawa perubahan dalam struktur interaksi sosial, termasuk hubungan yang menjadi lebih cair dan fleksibel (Giddens, 1991). Dalam pendidikan, fenomena ini terlihat pada pola komunikasi guru dan siswa yang semakin egaliter.

Perpaduan antara komunikasi formal dan informal di media sosial seringkali menciptakan ambiguitas dalam hubungan guru dan siswa. Di satu sisi, pendekatan informal dapat membangun kedekatan emosional, tetapi di sisi lain dapat mengaburkan struktur hierarki dalam pendidikan. Menurut Anthony Giddens, hubungan sosial di era modern cenderung lebih fleksibel dan tidak kaku, namun tetap membutuhkan aturan untuk menjaga keseimbangan (Giddens, 1991). Lebih lanjut, penggunaan bahasa informal seperti slang atau singkatan digital dapat memengaruhi kualitas komunikasi pendidikan. Jika digunakan secara berlebihan, hal ini dapat mengurangi kejelasan pesan serta menurunkan nilai akademik komunikasi tersebut. Guru perlu menyesuaikan gaya bahasa tanpa menghilangkan unsur edukatif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara formalitas dan fleksibilitas. Guru dapat menggunakan pendekatan yang lebih santai untuk menarik perhatian siswa, tetapi tetap menjaga norma kesopanan dan struktur komunikasi yang jelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif tanpa mengabaikan etika.

Penggunaan bahasa yang tidak sopan atau terlalu akrab, Interaksi di luar konteks pendidikan yang berlebihan, Penyebaran informasi pribadi tanpa izin, Cyberbullying atau komentar negatif. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa literasi digital dan etika komunikasi masih menjadi tantangan. UNICEF menyebutkan bahwa lingkungan digital yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak dan keamanan anak (UNICEF, 2020). Pelanggaran etika dalam komunikasi digital seringkali terjadi karena kurangnya kesadaran akan batasan yang ada. Banyak pihak menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa aturan

---

yang mengikat. Padahal, interaksi yang terjadi tetap memiliki konsekuensi sosial dan bahkan hukum. Selain itu, faktor anonimitas atau jarak sosial dalam komunikasi digital juga dapat mendorong seseorang untuk bertindak di luar batas etika. Individu cenderung lebih berani menyampaikan hal-hal yang tidak pantas karena tidak berhadapan langsung. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan.

Menurut UNICEF, lingkungan digital yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko perilaku negatif, termasuk pelanggaran etika komunikasi (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan mengenai etika digital bagi guru dan siswa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya batas yang jelas dalam komunikasi. Selain itu, perbedaan generasi antara guru dan siswa juga memengaruhi cara berkomunikasi. Guru mungkin belum sepenuhnya memahami budaya digital siswa, sementara siswa cenderung menganggap komunikasi digital sebagai sesuatu yang bebas. Menurut Danah Boyd, remaja melihat media sosial sebagai ruang sosial utama, sehingga norma yang berlaku seringkali berbeda dengan norma formal di dunia pendidikan (Boyd, 2014). Hal ini menuntut guru untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai profesional. Tantangan lain dalam komunikasi digital adalah kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi, sementara siswa cenderung lebih adaptif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses komunikasi. Selain itu, arus informasi yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi, namun tidak semuanya valid. Guru perlu berperan sebagai filter yang membantu siswa memilah informasi yang benar dan relevan. Dalam pandangan Danah Boyd, media sosial membentuk cara remaja berinteraksi dan memahami dunia di sekitarnya (Boyd, 2014). Oleh karena itu, komunikasi digital dalam pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar tetap berada pada jalur yang konstruktif.

Privasi menjadi aspek penting dalam komunikasi digital. Guru harus mampu menjaga jarak yang sehat dengan siswa, termasuk tidak mencampur urusan pribadi dengan profesional. Misalnya, tidak menerima pertemanan di akun pribadi atau membatasi komunikasi hanya pada platform resmi pembelajaran. Konsep ini sejalan dengan prinsip etika profesional yang menekankan perlindungan terhadap peserta didik. Guru perlu memastikan bahwa setiap interaksi digital tetap berada dalam koridor pendidikan dan tidak melanggar norma sosial maupun hukum. Batasan privasi menjadi fondasi penting dalam menjaga hubungan profesional antara guru dan siswa. Dalam era digital, informasi pribadi dapat dengan mudah tersebar, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam berbagi maupun mengakses informasi tersebut. Guru perlu menetapkan aturan yang jelas terkait penggunaan media sosial, seperti memisahkan akun pribadi dan profesional atau menggunakan platform khusus untuk pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk menjaga jarak yang sehat sekaligus melindungi kedua belah pihak. Sejalan dengan prinsip yang ditekankan oleh UNESCO, perlindungan privasi merupakan bagian penting dari etika digital (UNESCO, 2021). Dengan menerapkan batasan yang tepat, komunikasi digital dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan tetap profesional.

---

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika etika komunikasi antara guru dan siswa di media sosial mengalami pergeseran signifikan akibat kaburnya batas antara ranah personal dan profesional. Berdasarkan perspektif Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*), interaksi digital menempatkan guru dan siswa sebagai pemilik bersama informasi yang menuntut adanya koordinasi batas privasi yang jelas. Ketidaksiharuan aturan privasi berpotensi memunculkan turbulensi komunikasi, seperti *oversharing*, pelanggaran privasi, hingga *cyberbullying*. Selain itu, perbedaan literasi digital dan kesenjangan generasi turut memperkuat kompleksitas interaksi, sehingga etika komunikasi digital menjadi fondasi penting dalam menjaga profesionalitas, kepercayaan, serta kualitas hubungan edukatif di ruang siber. Adapun tujuan utama penelitian telah tercapai, yaitu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana guru dan siswa menegosiasikan batasan privasi dalam interaksi di media sosial melalui perspektif Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management*). Analisis ini berhasil mengungkap mekanisme pembentukan aturan privasi, pola koordinasi batas kolektif, serta potensi terjadinya turbulensi komunikasi akibat pelanggaran batas tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa penguatan etika komunikasi digital melalui penetapan batasan yang tegas, pengelolaan informasi yang bertanggung jawab, serta peningkatan literasi digital merupakan langkah strategis untuk menciptakan interaksi pendidikan yang aman dan konstruktif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi kebijakan etika komunikasi digital di institusi pendidikan serta mengeksplorasi model intervensi berbasis literasi digital yang efektif dalam meminimalisir konflik privasi di media sosial.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen Universitas K.H. Abdurrahman Wahid atas bimbingan dan masukan selama penyusunan artikel ini dan ucapan terimakasih juga kepada para peneliti akademisi yang karyanya menjadi rujukan dalam penelitian ini, serta kepada lembaga pendidikan dan perpustakaan yang menyediakan akses terhadap sumber literatur. Penulis turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada QOSIM: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah menjadi wadah publikasi bagi karya ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfiarni, A., R., Rohmani, E., S., Citra, R., N., Mahira, Al., R., & Trisakti, A., F. (2022). MANAJEMEN PRIVASI KOMUNIKASI PADA INSTAGRAM STORIES MAHASISWI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU. *JRMDK: Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 4(3), 297-301. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jrmdk.v4i3.22035>
- Amelia, A., D., Fauzi, I., & Zawawi, I., M. (2025). Profesionalisme Guru di Era Digital: Menjaga Integritas di Tengah Krisis Etika Pendidikan. *Jurnal Sadewa*:

- Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, 3(4), 223-233.  
<https://journal.aripi.or.id/index.php/Sadewa>
- Azzahra, A., Saepudin, Ridha, M., & Shera, A., P., & Azzahra, F. (2025). Etika Komunikasi Sebagai Landasan Interaksi Sosial Yang Efektif, Sopan Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Komunikasi Dan Kewirausahaan*, 1, 21-27.
- Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. (New Haven & London: Yale University Press).
- Bunga, D., Cokorde Istri, D. L., Kadek Ary, K. A., & Purnama Dewi, P. D. (2022). Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing Di Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-12.
- Cangara, H. (2023). Etika komunikasi: Menjadi manusia yang santun berkomunikasi dalam era digital. *Prenada Media*.
- Daniya, V. (2021). Management Privacy Dalam Penggunaan Fitur "Close Friend" di Instagram. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(1), 249-266. DOI: 10.25139/jsk.v5i1.2652
- Don, D., & Armawan, I. (2025). Etika dan regulasi komunikasi digital (digital communication ethics and regulation). *Madhangi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 1-10.
- Edvra, A., P., Hariyanto, C., M., & Zarika, T., L. (2025). Manajemen Privasi Pengguna Aplikasi Kencan Daring Perempuan Semarang dalam Mengatasi Ancaman Privasi. *Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia*, 6(2), 94-114.  
<https://journal.ugm.ac.id/jmki/issue/view/5791>
- Firmansah, S., & Ramadhan, N., A. (2024). Analisis Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Media sosial Instagram (Mahasiswa Inbound PMM 2 Universitas Bandar Lampung). *KONTEKSTUAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 34-41.  
[www.ubl.ac.id/kontekstual](http://www.ubl.ac.id/kontekstual)
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. (Stanford: Stanford University Press).
- Jaya, N. A. T. H. C. K. (2024). Bentuk-bentuk etika komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Qur'an. *Journal of Da'wah*, 3, 114-136.
- Jenkins, H., Purushotma, Ravi, Weigel, Margaret, Clinton, Katie, Robison., & Alice J. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. (Cambridge, MA: MIT Press).
- Kadek Rima Anggen Suari, A., R., K., & Sarjana, M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-146. DOI: 10.38043/jah.v6i1.4484
- Kamilah, N., F., & Lestari, B., S. (2020). Manajemen Privasi pada Pengguna Media Sosial Instagram. *Interaksi Online*, 9(1), 98-108. Retrieved from [https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi\\_online/article/view/29574](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi_online/article/view/29574)
- Manik, W. (2025). Etika Komunikasi Guru dan Siswa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(02), 2625-2637. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/juperan/article/view/1869>
- Margaretta, S. (2025). Tantangan dan solusi dalam etika komunikasi di era digital.

- 
- Petronio, S. (2012). *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure*. New York: State University of New York Press.
- Petronio, S., & Child, J. T. (2020). Conceptualization And Operationalization: Utility Of Communication Privacy Management Theory. *Current Opinion in Psychology*, 31, 76–82. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.08.00>
- Petronio, S., & Hernandez, R. (2019). Teori Manajemen Privasi Komunikasi, 1-18. DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.373>
- Priyono, P. E. (2022). *Komunikasi dan komunikasi digital*. Medan: Guepedia.
- Putra, A. E., Doho, Y. D. B., Savitri, G. A., & Fianto, L. (2023). Prinsip dan etika komunikasi dalam penggunaan media baru. *Nomosleca*, 2.
- Rahman, A., A., & Wijaya, B., H., S. (2025). Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Fitur Spaces Di Media Sosial X (Studi pada Mahasiswa dalam Melakukan Pengungkapan Diri Mengenai Hubungan Percintaan pada Periode September – November 2024 di Kota Surakarta). *Jurnal Komunikasi Massa*, 18(2), 73-84. <https://jurnal.uns.ac.id/kom/>
- Sabarin, G., & Djunaidi, A. (2018). PERAN GURU DAN MASYARAKAT SEKOLAH DALAM MENGHADAPI PENGARUH MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN KENAKALAN REMAJA DI SMA NEGERI 1 MAUPONGGO. *CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 73-81.
- Salsabilaa, S., Andilab, M., & Syahril, A. (2025). Komunikasi Interpersonal Media Sosial Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang. *Journal Educational Research and Development*, 1(3), 297-301. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jerd>
- Sari, M. (2026). Implementasi nilai-nilai etika dalam proses komunikasi anak usia dini. *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 12, 42–54.
- Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. (London: Bloomsbury Academic).
- Solove, D. J., & Schwartz, P. M. (2020). *Information privacy law*. Aspen Publishing.
- Susanti, R., Yasmi, F., & Dianto, M. (2022). Profil Etika Komunikasi Peserta Didik dengan Guru di Media Sosial Whatsapp pada Kelas XI IPS SMAN 1 Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 6633–6640. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7771>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- UNICEF. (2020). *Children in a Digital World*. New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF).
- Widayanthi, D. G. C., & Wulandari, A. S. (2025). *Communication ethics: Etika komunikasi modern di era digital*. Deepublish.